

KIC
Pid 18/02
Rid
s

SKRIPSI

MUHAMMAD RASYID RIDHA

SITA DALAM PERADILAN AGAMA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

SITA MELALUI PERADILAN AGAMA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI

SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR

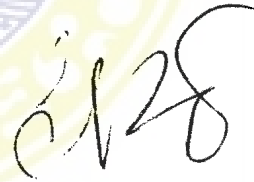
SARJANA HUKUM

PEMBIMBING,

PENYUSUN,



(Drs. ABDUL SHOMAD, S.H., M.H.)



(MUHAMMAD RASYID RIDHA)

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan, yaitu

1. Mengenai ketentuan-ketentuan umum mengenai sita sebagai penjamin terlaksananya putusan hakim

Ketentuan-ketentuan mengenai mengenai sita dalam Hukum Acara Peradilan Agama pada dasarnya tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Umum, sama-sama berdasarkan pada H.I.R , yang membedakannya adalah bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Agama selain menggunakan peraturan perundang-undangan Peradilan Umum juga menggunakan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber pelaksanaan sita di Peradilan Agama. Sita mempunyai kedudukan yang penting dalam beracara di Pengadilan, karena sita dapat menjamin hak-hak pencari keadilan agar putusan hakim dapat dilaksanakan. Sita merupakan tindakan pendahuluan, yang berarti bahwa sita dapat diajukan sebelum pokok perkara diputus, dan bisa juga diputus sepanjang belum *in kracht*.

²⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Negara Kalimantan Selatan, Tanggal 6 November 2001

Sita tidak menjamin kemenangan pihak pemohon bila permohonan sitanya dikabulkan, sita menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan hakim tidak akan hampa, ketika sita diletakkan maka penggugat dan tergugat tidak dapat melakukan sesuatu terhadap barang yang telah diletakkan sita tersebut.

2. Mengenai berlakunya sita dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Di Peradilan Agama sita sangat diperlukan dalam proses beracara, sebagaimana di Peradilan Umum. Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai sumber hukum Hukum Acara Peradilan Agama memuat ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan sita di Peradilan Agama.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 maka penyitaan di dalam peradilan Agama berlaku sebagaimana di pengadilan umum, dilaksanakan secara mandiri tanpa memerlukan pengukuhan dari Peradilan Umum dan Pengadilan Agama mempunyai juru sita sendiri untuk melaksanakan penyitaan

Pada kasus di Pengadilan Agama Negara, Kalimantan Selatan, Nomor : 50/pdt.G/1997/PA.Ngr. dan Nomor : 11Pdt.G/1995/PA.Ngr, yang telah saya uraikan dalam Bab III, Pengadilan Agama dapat melaksanakan sita secara mandiri.

2.Saran-saran

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang mandiri dengan fungsi dan wewenang tersendiri dan diperuntukkan bagi golongan rakyat yang beragama Islam tentu harus memiliki kekhususan yang memperkuat ciri keislamannya.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan sumber hukum acara Peradilan Agama, hendaknya memuat secara terperinci mengenai hukum acara bagi Peradilan Agama yang berlaku kebanyakan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Maka menurut saya sudah sepantasnya mengenai hukum acara Peradilan Agama diatur dengan lebih terperinci dengan lebih memperlihatkan ciri sebagai peradilan bagi golongan rakyat yang beragama Islam